

B A B III

POLITIK PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

A. BIDANG PEMERINTAHAN DAN MILITER

Serangan kilat oleh pihak militer Jepang terhadap Belanda tanggal 14 Pebruari 1942, mengakibatkan penyerahan tanpa syarat oleh Jendral Terporten (Belanda) kepada Jendral Imamura (Jepang).¹ Akibatnya terjadilah perpindahan kekuasaan, baik kekuasaan dalam bidang Pemerintahan, Militer, Pendidikan dan lainnya.

Dalam bidang Pemerintahan, cara-cara Jepang dalam menanganinya sangat berbeda dengan cara-cara Belanda. Pada zaman Belanda hanya terdapat satu Pemerintahan sipil sementara pada zaman Jepang terdapat tiga Pemerintahan Militer Pendudukan, di antaranya :

1. Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara kedua puluh lima) untuk daerah Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi.
2. Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara keenam belas) untuk daerah Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta.
3. Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada selatan kedua) untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dengan pusatnya di Makasar.²

¹George Mc. Truman Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (Cornell University Press, 1970), hal. 101.

²Marwati Djoened Posponegoro, Nugroho Notokusanto, Sartono Kartodirjo, Sejarah Nasional Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hal. 7.

Namun keputusan Jepang itu hanya bersifat sementara terutama Pendudukan Militer yang ada di Jawa,³ hal ini sesuai dengan UU yang dikeluarkan Pemerintah Panglima Militer ke 16 No.1, pasal 1, pada tanggal 7 Maret 1942 yang berisi :

Pasal 1, Bala Tentara Nippon melangsungkan kekuasaan Militer ke Daerah-daerah yang sudah ditempati, agar mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera.
 Pasal 2, Pembesar Bala Tentara Jepang memegang kekuasaan tertinggi, dan juga segala kekuasaan yang dulu berada di tangan Belanda.
 Pasal tiga, semua badan pemerintahan hukum, UU, diakui syah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan Militer.
 Pasal Empat, bahwa Pemerintah menghormati kedudukan dan kekuasaan Pegawai yang setia kepada Jepang.⁴

Dengan dikeluarkan UU itu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Jepang ingin terus menggunakan aparat Pemerintahan sipil yang lama beserta para pegawainya, agar pemerintahan dapat berjalan terus dan mantap tanpa hambatan dan rintangan apapun. Kalau dibandingkan dengan pemerintahan Belanda, pada zaman itu yang menjadi pemimpin adalah orang sipil, tetapi pada zaman Jepang pemimpinnya kebanyakan adalah orang-orang Militer baik di pusat maupun di daerah.

Adapun susunan Militer terdiri dari Gunshereikan (Panglima tentara) atau Saiko Shikikan, kemudian di bawah Seiko Shikikan adalah Gunseikan (Kepala Pemerintahan Militer yang merangkap kepala staf Tentara). Apabila Pemerintahan akan mengeluarkan beberapa peraturan, maka peraturan itu diumumkan dalam Kan po (Berita Pemerintah).⁵

³Ibid., hal. 6.

⁴Ibid., hal. 7.

⁵Ibid.

Dengan diangkatnya Pegawai-pegawai Indonesia, maka pada tanggal 1 April 1942, Pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan peraturan Gaji Pegawai Negeri dan Lokal, untuk sementara waktu, Gaji Bangsa Indonesia yang dulu di bawah F. 100 sebulan akan tetap dibayar sediakala, tetapi bagi mereka yang gajinya melebihi F. 100 terkena potongan yang cukup besar, di samping itu ditetapkan pula bahwa Pemerintah tidak dibolehkan untuk memberi gaji kepada pegawai Indonesia melebihi dari F. 100.⁶

Mungkin Pengangkatan Pegawai-pegawai Indonesia itu dilakukan secara terpaksa oleh pemerintah Jepang, dikatakan terpaksa karena sebenarnya sebagian pegawai-pegawai angkatan pertama yang ditugaskan oleh Pemerintahan Jepang tidak sampai ke Indonesia, karena kapal yang mengangkut mereka ditenggelamkan oleh Terpedo sekutu,⁷ lebih lebih berlangsungnya Perang Pasifik yang semakin menggebu-gebu itu Jepang semakin terjepit, akibatnya diperlakukan kembali tenaga-tenaga Bangsa Indonesia guna menahan Opensif Serangan sekutu itu. Dikuatkan lagi dengan Sidang Parlement Istimewa ke 82 di Tokyo yang berisi Pemberian kesempatan kepada orang-orang Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan Negara, yang meliputi Badan-badan pertimbangan, di daerah maupun pusat serta Jabatan Tinggi untuk orang-orang Indonesia sebagai Penasehat.

Pengangkatan untuk Jabatan tinggi tersebut dinikmati oleh Prof. Dr. Husein Djojodiningrat sebagai Kepala Kantor Departemen Urusan Agama (Shumubu) tanggal 1 Oktober 1943 disusul dengan Mas Sutarjo Kartohadikusumo dan RMTA. Surio diangkat menjadi Shucukan di Jakarta dan

⁶Ibid., hal. 13 _____ Harga Beras pada masa itu satu kilogram adalah F. 0,12.

Bojonegoro,⁷ kemudian Haji Agus Salim, bekerja sebagai Penasehat untuk membantu usaha-usaha menterjemahkan buku buku Bahasa Jepang,⁸ Soekarno. Menjadi Penasehat Urusan Umum, Supomo untuk Departemen Kehakiman,⁹ M.Natsir menjadi Kepala Pengajaran Bandung,¹⁰ dan lain sebagainya.

Adapun dalam bidang kemiliteran, bahwa sejak bulan-bulan pertama Ofensif Jepang, kekurangan tenaga manusia segera terasa. Karena mabuk oleh sejumlah kemenangan-kemenangan dalam beberapa bulan saja, Komando tertinggi Jepang memutuskan untuk mengeksploitasi situasi dengan melakukan operasi Ofensif kepada Paramater barat dan timur Asia Tenggara. Untuk melakukan itu, mereka perlu menggunakan tenaga manusia dari Indonesia dan Malaisia.¹¹

Salah satu di antara Perwira-perwira yang ditugaskan untuk melaksanakan hal itu, adalah Kolonel Nishiura-Susumu, yang pada waktu itu ia menjadi anggota Biro

⁷Ibid., hal. 6; dalam bukunya Abd.Aziz, Perjuangan Hizbullah dalam Perang Kemerdekaan di Surabaya, tidak diterbitkan, 1983, (Skripsi Fak. Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya), 1983, hal. 13.

⁸Marwati Joened Posponegoro, op. cit., hal. 13.

⁹Taufik Abdullah, Daniel Dhakidae, Aswab Nahasin, (Redaksi), Manusia dalam Kemelut Sejarah (Jakarta:LP3ES, Cet. V, 1988), hal. 127.

¹⁰A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas (Jakarta: Gunung Agung, 1982), I, hal. 61. Begitu juga Kyai H. Hasyim Asy'ari diangkat menjadi Shumubu, K.H. Misbach Wakil Shumukacho Daerah Jatim dan sebagainya, Kuntowijoyo, "Posisi Sosial Umat Islam Indonesia Dari Masa Ke Masa", Panji Masyarakat (Pebruari, 1985), hal. 31; K.H. Misbah, Wawancara, 16 Pebruari 1989 di Masjid Al Falah Surabaya, K.H. Hamzah, Wawancara, 14 Pebruari 1989 di Mojokerto.

¹¹Nugroho Notosusanto, Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia (Jakarta : Gramedia, 1979), hal. 54.

urusan Militer dan kementerian angkatan Darat. Dengan se-
gudang pengalaman-pengalaman yang telah direnguk, Ni-
shiura menyusun Naskah-stafnya, menggunakan pasukan-pa-
sukan Pribumi dari Negeri yang telah diduduki untuk meng-
gantikan satuan-satuan yang digerakkan ke wilayah-wila-
yah pertempuran di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan.
Akhirnya Naskah-stafnya itu diterima oleh atasannya, dan
serangkaian keputusan segera diambil mengenai penggunaan
pasukan pribumi oleh Pasukan Jepang.¹²

Pelaksanaan keputusan itu segera terealisasi, de-
ngan dibentuknya Heiho, sementara pelaksanaan latihan-
latihan Heiho (Pembantu prajurit), didasarkan atas suatu
petunjuk kementerian angkatan darat tanggal 23 September
1942, dengan nama kode Riku-a-mitsu No 3636 yang isinya,
beberapa pedoman-pedoman mengenai latihan Heiho. Adapun
pemasarannya, Heiho juga dikirim ke Malaisia, Muangthai,
Berma, Indo-cina, Sorong, Manukwari, Halmahera, Sorong,
Papua Nugini, Solomon. Menurut Eks Heiho, pembentukan pa-
sukan heiho mula-mula dimaksudkan untuk mempunyai suatu
angkatan kerja yang dapat secara langsung membantu pasu-
kan-pasukan Jepang di dalam melakukan kerja kasarnya.
Perkiraan mengenai jumlah Heiho pada akhir pendudukan
Jepang adalah kurang lebih 42.000, para heiho secara mi-
liter mendapatkan latihan secara baik dari pada Peta.¹³

Sungguh pun angkatan darat Jepang sudah mempunyai
anggota-anggota yang Non Jepang, yakni Korea dan Taiwan,
tapi mereka itu dianggap Kawula Jepang dan mempunyaista-
tus resmi yang sama dengan orang Jepang yang asli. Hal
itu dikarenakan Taiwan dan Korea di Aneksi menjadi bagi-

¹² Ibid., hal. 55; M. Misron, wawancara, 28 Janua-
ri 1989 di Ngawi.

¹³ Ibid., hal. 56.

an integral kemaharajaan Jepang.¹⁴

Dalam kaitannya dengan Heiho, saya bisa dinilai bahwa Jepang merekrutnya dilandasi dengan pemikiran "Pragmatis", dinilai pragmatis sebab letupan-letupan Perang Pasifik sudah mulai terasa, dengan Slogan "Saudara Tua", "Kemakmuran Asia Timur Raya" untuk merangkul sebanyak-banyaknya orang-orang Indonesia.

Nampaknya, memang masa pendudukan Jepang bisa dikatakan masa "penuh dengan Slogan", padat dengan program, tapi isinya tidak terealisasi.¹⁵ Hal ini terlihat pada Gerakan "Tiga A" (Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia). Namun pada akhirnya, Gerakan yang dipimpin oleh Syamsuddin ini tidak mendapat respon dari masyarakat.¹⁶ Sebagai tindak lanjutnya Ir. Soekarno bersama teman-temannya Drs. Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansur membentuk suatu Organisasi bernama POETRA (Pusat Tenaga Rakyat) yang diresmikan pada tanggal 9 Maret 1943.¹⁷ Namun Organisasi

¹⁴ Ibid., hal. 55.

¹⁵ Ridwan Saidi, "Tiada Hari Tanpa Slogan," Panji Masyarakat, 427 (April, 1984), hal. 28. Masa itu memang terlalu sulit untuk dikatakan pembangunan ekonomi, Keong bekicot menjadi saksi sejarah, betapa kesulitan hidup di mana-mana. Program politik Dai Nippon semaksimal mungkin di masyarakatkan, oleh karena itu rupa-rupa slogan ditelurkan untuk menjambret solidaritas politik dari Kocek Masyarakat. Peperangan (Inggris—sekutu) dicoba di masyarakatkan "Inggris Kita Linggis, Amerika Kita sterika. Slogan tersebut cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia meskipun jumlah terbesar masyarakat Indonesia tidak mengenal apa yang dinamakan Sretika, karena baju Bokor (Goni) sama sekali tidak mengenal sretika.

¹⁶ Willard H. Elsbree, Japan's Role In Shouth East-Asean Nationalis Moveman 1940 to 1945, (Harved University Pres : 1953), hal. 79.

¹⁷ Nugroho Notosusanto, Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia (Jakarta : Gramedia, 1979) hal. 41-43; H. Rosihan Anwar, Demi Da'wah (Bandung : Al Ma'arif, 1976), hal. 21.

POETERA ini juga harus menghadapi kenyataan bahwa simpati dari masyarakat tidak ada, hal ini diakui oleh Soekarno sebagai berikut :

"... Tokyo menganggap Pusat tenaga Rakyat ini sebagai alat dari Soekarno untuk menggerakkan bantuan Rakyat di garis belakang bagi kepentingan mereka, tapi Soekarno mengartikannya sebagai alat nomer dua yang paling baik untuk melengkapkan sesuatu badan penggerak politik yang sempurna.¹⁸

Sebagai langkah selanjutnya Pemerintah Jepang membentuk Organisasi baru yang mayoritas pengurusnya terdiri dari bangsa Jepang, bahkan Organisasi ini dipimpin langsung oleh kepala Pemerintahan Jepang (Gunseikan).¹⁹

Organisasi tersebut bernama Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa) yang didirikan pada tanggal 8 Januari 1944 dan dalam prakteknya Organisasi ini sama sekali tidak mendapat respon bagi rakyat Indonesia.²⁰ Kalau kita lihat sepintas kilas, kiranya jelas bahwa dilihat dari sudut Indonesia Organisasi itu (Jawa Hokokai) merupakan langkah mundur dibandingkan dengan POETERA.

Setelah melalui berbagai macam kerja sama dengan Pemimpin " Nasionalis Sekuler " yang kurang dapat memuaskan hasilnya bagi pemerintahan Jepang maka pemerintah mulai mengalihkan perhatiannya terhadap tokoh-tokoh Islam Indonesia yang dinilainya memiliki pengaruh kuat di kalangan masyarakat pada umumnya, Pemerintah Jepang

¹⁸Cindy Adam (Penterj.) Mayor Bar Salim, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat (Jakarta : Gunung Agung, 1966) hal. 271.

¹⁹Sartono Kartoderjo, Trend Struktural dalam Radikalisme, Panji Masyarakat (Desember 1984), hal. 264.

²⁰Nugroho Notosusanto, op. cit., hal. 43.

berusaha bekerja sama dengan seluruh umat Islam yang masing-masing dengan tujuan yang berbeda, di satu sisi Jepang mencari dukungan dalam Perang Asia Timur Raya, di sisi lain umat Islam ingin mempergunakan kesempatan dan mengeruk pengalaman sebanyak-banyaknya demi tegaknya Agama dan Negara. Dengan demikian umat Islam mulai mendapat uluran tangan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Jepang.²¹

Pemerintah Jepang menyadari bahwa sejak jaman Belanda para Ulama/Pemimpin Islam umumnya menganggap kafir dan anti penjajah dan menjadi Pemimpin yang berpengaruh bagi masyarakat Indonesia terutama di desa-desa, pendapat mereka lebih didengar dari pada yang lain. Pengaruh yang demikian itulah yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Jepang untuk melakukan propagandanya.²²

Pada tahun 1943 adalah era baru bagi perubahan-perubahan mendalam kebijaksanaan Jepang terhadap kehidupan politik di Indonesia, di samping itu pada tahun tersebut perang pasifik semakin menggebu-gebu. Jepang menderita kekalahan-kekalahan yang mengejutkan di wilayah-wilayah yang didudukinya dan tentara tersebar menipis meliputi areal yang sangat luas sekali itu, hal tersebut membuat tentara Jepang terjepit, satu persatu wilayah yang sebelumnya diduduki dirampas oleh sekutu. Sejak kekalahan armada-armadanya didekat Midway dan didekat kepulauan Solomon, mengakibatkan Jepang merubah taktik dari Posisi ofensif menjadi defensif dengan wilayah

²¹Deliar Noer, "Islam dan Politik," Prisma (Agustus 1979), hal.7, dalam buku Abd. Aziz, Perjuangan Tentara Hizbullah dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, op.cit hal. 17.

²²Ibid., hal. 18.

Indonesia dijadikan fron depan.²³

Untuk mendaratkan opsifnya itu, Jepang mengalihkan pandangannya pada pemuda-pemuda Indonesia untuk dilatih dan dididik kemiliteran. Kaibodan (Barisan bantu Polisi), Seinendan (Barisan Pemuda) dan Fuzinkai (Barisan Wanita) adalah sebagian organisasi Semi militer yang terdiri dari orang-orang Pribumi, disusul pada tanggal 3 Oktober 1943 terbentuklah Pembela Tanah Air (PETA), dengan Osamu saerai No.44 yang mengatur pembentukannya.²⁴

Pembentukan tentara PETA itu bermula dari usul Gatot Mangkuprojo kepada Seiko Shikikan tertanggal 7 September 1943, yang menginginkan didirikan pasukan sukarelawan Indonesia di Jawa, ternyata empat minggu kemudian permintaan tersebut dikabulkan.²⁵ Banyak kalangan PETA diambil dari kalangan Islam, bahkan calon-calon Komandan terdiri dari Kyai yang berpengaruh dalam masyarakat. Sebagaimana dikatakan Kasman Sinodimejo :

Sewaktu Jepang hendak mendirikan PETA di Jawa dan Madura yang diambil sebagai calon-calon Daidenco (Komandan batalion), Codenco (Komandan kompi) justru mereka yang mengerti agama atau mengerti tentang Islam, sampai-sampai orang yang namanya Kyai Sam'un, yang barangkali sejak kecil sampai tua tidak pernah berbaris, oleh Jepang juga dipaksa untuk menjadi komandan, Jepang justru memerlukan Kyai Sam'un itu yang mempunyai pengaruh besar di kalangan rakyat Indonesia guna menunjang kepentingan Jepang untuk memenangkan perangnya, dan masih banyak kyai-kyai lain

²³Sartono Kartoderjo, Pemberontakan Tentara Bli-tar Melawan Djepang (Jakarta : Dept. Hankam Lembaga Sejarah Hankam, 1968), hal. 7, dalam buku Abd. Aziz, op.cit., hal. 20.

²⁴Sartono Kartoderjo, op. cit., hal. 167.

²⁵Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit (Jakarta : Pustaka Jaya, 1980), hal. 172.

yang menjadi komendan.²⁶

Adapun MIAI, Jepang dalam hal ini mempunyai sifat mendua, di satu sisi dia membolehkan MIAI hidup di sisi lain juga membolehkan Muhammadiyah dan NU beroperasi, ini mengakibatkan pamor MIAI berkurang, di samping itu dinilai dan diakui sendiri oleh Jepang bahwa MIAI tidak menguntungkan bagi Jepang sehingga MIAI dibubarkan pada bulan Oktober 1943.²⁷

Untuk tidak terlalu mengecewakan umat Islam Indonesia dengan pembubaran MIAI tersebut, dibentuklah Organisasi baru Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang mendapat pengesahan dari Gunseikan pada tanggal 22 Nopember 1943 dengan pemimpin ketua pengurus besar K.H. Hasyim Asy'ari, dengan wakilnya dari Muhammadiyah K.H. Mas Mansur, K.H. Farid Ma'ruf, K.H. Mukti, K.H. Hasyim, Kartosudarmo dan dari NU : K.H. Nahwowi, Zainul Arifin dan Muhtar.²⁸

Tujuan Organisasi ini secara tegas dijelaskan oleh juru bicara organisasi tersebut, K.H. Mas Mansur yaitu untuk memperkuat persatuan semua organisasi Islam dan membantu Dai Nippon dalam kepentingan perang Asia Timur Raya.²⁹

Tenaga-tenaga Muda yang kemudian memegang Pimpinan Masyumi selain K.H. Wahid Hasyim, ialah Mohammad Natsir, Harsono Cokroaminoto, Prawoto Mangkusasmito yang

²⁶ Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, Hidup Itu Berjuang Kasman Singodimejo 75 Tahun, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982), hal. 50.

²⁷ Sartono Kartoderjo, op. cit., hal. 167.

²⁸ Harry J. Benda, op. cit., hal. 183.

²⁹ Sartono Kartoderjo, op. cit., hal. 168.

waktu itu bekerja pada Kantor Kadester, dan Zainul Arifin dari Kantor Gemeente (Kota Praja) dan lain-lainnya.³⁰ Sungguh pun kegiatan MIAI maupun Masyumi terbatas, namun ia merupakan penghimpun kekuatan Islam yang oleh saudara saudaranya seagama di luar Jawa juga diteladani, Soeara MIAI diterbitkan yang kemudian dilanjutkan dengan suara Muslimin Indonesia dengan berdirinya Masyumi.³¹

Yang juga tidak ketinggalan adalah berdirinya Organisasi semi Militer yaitu Hizbullah,³² berdiri pada akhir tahun 1944, yang bertujuan menggalang semangat Joang Islam untuk bersama-sama Dai Nippon mempertahankan dan melanjutkan Perang Asia Timur Raya sampai kemenangan akhir bagi Jepang.³³ Kemenangan akhir itu bagi umat Islam merupakan satu tanda bahwa pintu gerbang kemerdekaan akan terbuka. Salah satu slogan yang sangat meresap di hati pemuda pada masa itu adalah "Hidup Mulya Mati Syahid", adapun sebagai ketuanya adalah Zainul Arifin (salah satu dari utusan NU., dalam kepengurusan Masyumi), di antara pimpinannya adalah Moh. Roem, Anwar Cokroaminoto, Yusuf Wibisono, Prawoto Mangkusasmito.³⁴

Namun yang menjadi masalah dalam fasal ini adalah

³⁰Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, op.cit., hal 54.

³¹Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965 (Jakarta : Grafiti Pers, 1987), hal. 26.

³²Ahmad Syafi'i Ma'arif, Islam dan Masalah Kene-garaan (Jakarta : LP3ES, 1985), hal. 98.

³³K.H. Saifuddin Zuhri, Guruku dari Pesantren (Bandung : Al Ma'arif, 1977), hal. 201. Dalam bukunya Abdul Aziz, op. cit., hal. 29.

³⁴Ahmad Syafi'i Ma'arif, op. cit., hal. 18. B.J. Bolan (Penterj.), Safruddin Bahar, Pergumulan Islam di Indonesia (Jakarta : Grafiti Pers, 1982), hal. 15.

kepandaiannya Jepang dalam menciptakan suatu Manufer Politik, sehingga hubungan antara MIAI Pusat dengan Cabang tidak terlalu Mesra. Begitu juga hubungan antara Masyumi Pusat dengan Cabang, sehingga dalam mengadakan reaksi, umat Islam hanya bergerak sendiri-sendiri, malah di luar Jawa hanya bersifat Lokal (Se-tempat).³⁵

B. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Untuk melacak Politik Pendudukan Jepang dalam bidang Pendidikan sangatlah sulit, apalagi buku-buku yang membahas masalah Pendidikan pada zaman Jepang amat sedikit, sementara angkatan Bersenjata Jepang memberikan Porsi yang amat sedikit terhadap bidang yang satu ini.

Namun yang jelas, sistim Pengajaran dan Pendidikan di jaman Jepang ini nampaknya sering terjadi perubahan-perubahan, berbeda dengan sistim yang dilakukan Belanda yang menganaktirikan orang kecil, maka pada jaman Jepang ini dihapus. Istilah status sosial dihapus, sejak jaman Jepang Bahasa dan Istilah Indonesia selalu muncul ke permukaan dan mulai dipergunakan dalam sekolah-sekolah. Dalam hal ini sekolah dasar dirubah menjadi sekolah rakyat (Kokumin Gakko) terbuka untuk semua golongan, kemudian SMP, dan selanjutnya Sekolah Menengah Tinggi, lama pendidikannya adalah tiga tahun untuk SMP, dan tiga tahun untuk SMT. Hukum yang ada sebelumnya dihapus.³⁶

³⁵Prisma 5, XVII, 1988, hal. 8. Hudan Asmara, Ku-liah SII (Surabaya : Fak. Adab IAIN Sunan Ampel, periode 1987/1988).

³⁶Badan Pendidikan Pengembangan Kebudayaan, Pendi-dikan di Indonesia 1900-1974 (Jakarta:Balai Pustaka,1976), hal 41.

Yang paling menarik di sini adalah Taman Siswa, salah satu lembaga yang sudah terkenal lama ini dibatasi ruang geraknya, yang diperbolehkan pada waktu itu pada Sekolah Dasar saja.³⁷ Sementara Sekolah Muhammadiyah dan Pesantren NU., Perserikatan Ulama (Majalengka) dibolehkan meneruskan kegiatannya.³⁸

Tahun-tahun pertama pendudukan, ada usaha-usaha untuk membrangus dan melarang diajarkannya Bahasa Arab di semua Sekolah-sekolah Agama, terutama Sekolah-sekolah Arab yang memakai Bahasa Arab sebagai Bahasa Pengantar.³⁹

Sekolah-sekolah Arab, sebagaimana Sekolah-sekolah swasta yang lain, telah tutup ketika Invasi Jepang. Namun pada tanggal 29 April 1942, yang merupakan hari lahirnya Kaisar, diumumkan bahwa Sekolah-sekolah swasta bisa dibuka kembali setelah memperoleh ijin khusus. Namun Sekolah-sekolah Arab harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mendapat pengawasan yang lebih ketat, bahkan menurut berita hanya tujuh Sekolah Arab yang boleh beroperasi.

Pada akhir tahun 1942, penjajah Jepang terang-terangan menyadari bahwa tidaklah mungkin mengingkari hak muslim untuk mengajarkan bahasa Al Qur-an, bahasa suci itu, dan mengakui sepenuhnya dalam penggunaan dan maksud

³⁷Prisma 5, op. cit., hal. 9.

³⁸Ibid.; namun yang agak menjengkelkan adalah bahwa Guru Agama pada jaman Jepang tidak dibayar oleh Jepang, Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta : Hidakarya Agung, 1985), hal. 122.

³⁹Harry J. Benda, op. cit., hal. 159.

maksud pengajaran agama. Namun mereka berhasil memaksakan kurikulum standar di dalam mata pelajaran non agama. Dengan demikian, kalau sekiranya Nippon tidak sama sekali membunuh Momok pan-Islam,⁴⁰ dia telah membayar dengan harga tinggi untuk tetap membiarkannya.⁴¹

Kendatipun demikian antara teori dan praktek sering bertentangan, sering mengobral janji; namun tak ada isinya. Janji-janji untuk mendirikan Universitas Islam Indonesia yang sering diucapkannya sebelum pendudukan, hanyalah tinggal janji. Meskipun ada keinginan baik Jepang terhadap sebuah lembaga Pendidikan Islam, apalagi usaha MIAI untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam juga tidak mendapatkan ijin.⁴²

Mungkin Jepang memang tidak ingin Islam mengalami kemajuan-kemajuan, sehingga menimbulkan adanya kecemburuan dan ketidakserasian, atau yang lainnya. Praduga itu beralasan sekali bila kita kaitkan nilai dan fungsi dari pada existensi pendidikan itu sendiri, lebih-lebih pendidikan merupakan faktor terpenting untuk membentuk generasi yang peka terhadap keadaan dan perjuangan.

Adanya kecemburuan dan ketidakpastian itu nampak pada tindakan bangsa Jepang yang mau menyusupkan budaya

⁴⁰Pengertian Pan-Islam secara klasik adalah penyatuan seluruh dunia Islam di bawah satu kekuasaan politik dan agama yang dikepalai oleh seorang Khalifah, Turki berusaha menggunakan Pan-Islam untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah kerajaan Usmani. Usaha ini cepat menarik perhatian Asia Afrika yang pada waktu itu hampir seluruhnya sedang dijajah Bangsa Barat, atau Asia sendiri (Jepang). Tapi dalam perkembangan berikutnya, Pan-Islam sekedar berusaha untuk menyatukan seluruh umat Islam dalam satu ikatan setia kawan, menghidupkan perasaan ukhuwah Islamiyah di kalangan Dunia Islam. Lihat H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta :LP-3 ES, 1985), hal. 80.

⁴¹Harri J. Benda, op. cit., hal. 160.

⁴²Ibid., hal. 178.

sedikit demi sedikit melalui jalur orang yang berpengaruh dengan jalan mengadakan penataran-penataran, sekaligus mendoktrin Guru Agama dan Kiyai. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Gunseikan pada awal Desember 1942, yakni :

Memang, Pendidikan Agama Penting. Namun bilamana dilihat berdasarkan kemajuan dan perubahan yang berlangsung di dalam kehidupan generasi kita, adalah penting juga untuk mengajar sesuai dengan tuntutan jaman baru. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan masa lalu harus segera dilupakan, pada saat ini tugas kita yang paling penting adalah, bahwa Saudara-saudara meyakini sedalam-dalamnya sari-pati kebudayaan Nippon dan mulai mengenal keadaan di Negara tersebut bilamana dilengkapi dengan seperangkat pengetahuan itu. Saudara-saudara harus mendidik Kaulangan Muda dan bersedia bekerja bagi Asia Tenggara

.43

Ucapan yang tersebut di atas itu (Gunseikan), yang nampak kelihatan samar-samar itu, di satu sisi dia menghormati pendidikan, di sisi lain menggusur pendidikan, melalui berbagai macam Slogan Asia.

Usaha-usaha untuk memasukkan Budaya Jepang ke dalam masyarakat Indonesia tidak pernah mengalami kevakuman, Merah Putih dan lagu Indonesia Raya yang berkumandang ketika menyambut kedatangan Jepang, menjadi barang terlarang dan tabu, kebiasaan Jepang yang suka menempeleng, yang di antara mereka merupakan suatu hal yang lumrah dan wajar, dinilai oleh rakyat Indonesia tidak

⁴³ Umumnya Penataran itu dikenal dengan nama Latihan Kiyai, latihan Kiyai adalah Penataran yang jangka waktunya lebih lama bila dibandingkan dengan penataran-penataran lainnya yang diselenggarakan oleh Jepang. Di dalam penataran ini para Ulama diindoktrinasi dengan ide dan propaganda Jepang dan mereka harus mendapat Doses yang cukup untuk memperokeh "Jiwa baru". Jepang mengharapkan agar semua para Kiyai mendapatkan penataran. Nourouzzaman Shiddiqi, op. cit., hal. 109.

wajar dan menyakitkan terlebih lagi bagi orang-orang yang memegang teguh ahlaq.⁴⁴

Bahkan anak-anak sekolah dicukur gundul kepalanya agar lebih mirip dengan orang Jepang, lebih-lebih budaya pakai topi ala Jepang yang tujuannya tak lain dan tak bukan agar jiwa bangsa Indonesia tercelup semangat dan tradisi budaya Jepang.⁴⁵

Upaya lain untuk memasukkan budaya Jepang adalah : Terciptanya Rumah Kuning (WTS, istilah sekarang) yang diambil dari wanita-wanita Indonesia, terutama wanita Sumatra Tengah sebagai Penghibur Tentara Jepang.⁴⁶

C. BIDANG KEAGAMAAN

Sikap Jepang terhadap masalah-masalah yang ada kaitannya dengan agama (Baca : Islam) pada awalnya adalah baik, tambahan pula penyamaan Jepang yang cekatan hampir pasti sampai ke tingkat tertentu efektif di Indonesia. Dengan menekankan apa yang disebut persamaan antara Shinto dengan dan Islam dia mengumbar harapan bahwa kaisar akan beralih agama, dan memeluk agama Muhammad, dan melukiskan suatu gambar gemilang tentang dunia kekuasaan Islam yang berpusat di keliling kaisar Khalifah Jepang Raya.⁴⁷

⁴⁴Tempo, 27 Desember 1986, hal. 96.

⁴⁵Clifford Geert, Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa (Jakarta : Pustaka Jaya, 1983), hal. 195.

⁴⁶Taufik Abdullah, Daniel Dhakidae, Aswab Mahasin Manusia dalam Kemelut Sejarah (Jakarta : LP 3 ES, 1988), hal. 235.

⁴⁷Harry J. Benda, op. cit., hal. 135.

Dengan demikian sulitlah kiranya mengukur sejauh mana sesungguhnya peran simpati umat Islam terhadap kedatangan Jepang, di saat rakyat Indonesia berada dalam kebingungan karena ditinggal pergi oleh penguasa yang lama, namun yang jelas terciptanya semacam kerja sama antara pemimpin-pemimpin umat dengan Jepang adalah dalam usaha mereka mempercepat tercapainya kemerdekaan.⁴⁸

Pernyataan serupa pernah diucapkan oleh Soekarno, dalam dialognya dengan seorang Panglima Angkatan Darat Kerajaan Jepang yaitu Kolonel Fujiyama :

Mau tidak mau aku harus mempercayai orang yang berperawakan kecil ini. Oleh karena aku melihat kunci permasalahan ada di tangannya ... Saya akan berikan bantuan saya sepenuhnya, saya akan menjalankan propaganda untuk tuan, tapi hanya kalau ia berlangsung menurut garis menuju pembebasan rakyat kami, dan dengan pengertian bahwa sambil bekerja sama dengan tuan saya pun berusaha untuk memperoleh kemerdekaan bagi rakyat saya.⁴⁹

Pernyataan serupa juga pernah diucapkan oleh Kiyai Haji Mas Mansur, bahwa : "Muslim bisa bekerja sama dengan Jepang asal saja Jepang tidak menghina umat Islam atau Agama Islam".⁵⁰ Penjajah Jepang sejak kedatangannya di Jawa dengan ucapan yang berulang-ulang menyampaikan maksudnya "menghormati dan menghargai Islam", dan memang bukan hanya terhadap umat Islam secara khusus akan tetapi secara umum terhadap bangsa Indonesia. Namun pada langkah-langkah berikutnya tentara pendudukan banyak yang mendapatkan kesulitan memahami apa yang dikatakan, bahkan sering pula peri laku Jepang menampakkan sifat kecerobohan yang berlebih-lebihan. Inilah yang nampak terlihat

⁴⁸Ahmad Syafi'i Ma'arif, op. cit., hal. 100.

⁴⁹Cendy Adam, op. cit., hal. 257.

⁵⁰Nourouzzaman Shiddiqi, op. cit., hal. 104.

ketidakkonsistennya Jepang sehubungan dengan kerja samanya dengan bangsa Indonesia itu.

Keangkuhan Jepang yang merasa dirinya superior dan menganggap selainnya lebih rendah, sukar untuk diterima oleh umat Islam yang membenci superioritas sosial, bahkan secara diam-diam Jepang bermaksud lebih dari sekedar bekerja sama untuk kepentingan perang, melainkan mereka berusaha me-Nipponkan seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali umat Islam,⁵¹ dalam artian Jepang dominan di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, agama atau lainnya, Jepang hendak membuat Indonesia seperti Mansyuria, Korea, Taiwan sebelum perang Dunia kedua.⁵²

Untuk me-Nipponkan bangsa Indonesia, maka seluruh pengaruh budaya Barat dan Arab (Baca : Islam) harus dibersihkan, langkah pertama; menjadikan Bahasa Jepang sebagai Lengua France bagi Asia.⁵³ Tidak mengijinkan dibukanya kembali Sekolah-sekolah yang menggunakan Bahasa Arab, juga di pesantren. Dengan jalan menyusun kurikulum baru yang berlaku bagi Sekolah-sekolah maupun Pesantren. Di antara kurikulum baru itu adalah mewajibkan Bahasa Jepang menjadi mata pelajaran pokok, sementara menggunakan buku tex yang berbahasa Arab harus seijin Shumubhu.⁵⁴

Demikian juga kebiasaan-kebiasaan Jepang yang tanpa busana kecuali celana dalam, berada di muka umum terutama di depan kaum wanita, juga kebiasaan penjajah Jepang yang sering mabuk-mabukan akibat minum Sare (sejenis minuman keras) khas Jepang, serdadu-serdadu Jepang

⁵¹ Ibid., hal. 104.

⁵² Ibid., hal. 105.

⁵³ Ibid., hal. 107.

⁵⁴ Ibid., hal. 108.

yang mandi telanjang di Meunasah-meunasah,⁵⁵ akibatnya mudah ditebak, rasa kejengkelan umat Islam yang berdampak pemberontakan.

Kemudian diwajibkan Seikerai.⁵⁶ (Penghormatan yang paling tinggi yang tertuju kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan mulai pinggang sedalam-dalamnya),⁵⁷ bahkan menganggap bahwa Tenno Haiko adalah dewa. Semuanya itu diwajibkan melakukannya baik kaum Muslimin ataupun para Ulama setiap pagi dan setiap pertemuan-pertemuan umum harus dibuka dengan melakukan seikerai, hadirin harus berdiri sigap; setiap penutupan dari suatu pertemuan harus mengucapkan Banzai dai Nippon dan Allahu Akbar tiga kali.⁵⁸

Sejalan dengan itu, dua Ulama NU terkemuka K.H. Hasyim Asy'ari dan Kiyai Haji Mahfud Siddiq ditangkap oleh Jepang dan dipenjarakan selama empat bulan. Kedua tokoh tersebut dituduh mendalangi aksi perusakandi pabrik gula Cuker, namun sebetulnya alasan penangkapan itu tidak beralasan sama sekali.⁵⁹

Demikian juga ditolaknya harapan-harapan Islam untuk mendirikan sebuah Masjid Agung dan Universitas yang diusulkan oleh MIAI selama berbulan-bulan tidak bisa terlaksana, sehingga menambah gerangnya umat Islam Indonesia.⁶⁰

⁵⁵ Ibid., hal. 105.

⁵⁶ Nugroho Notosusanto, op. cit., hal. 189.

⁵⁷ Nourouzzaman, op. cit., hal. 107.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Chairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama (Solo : Jatayu, 1985), hal. 114.

⁶⁰ Harry J. Benda, op. cit., hal. 178.

Terlebih lagi adanya usaha besar di Jawa Barat untuk mengumpulkan zakat yang dimotori oleh R.A.A. Wiranata Kusumah (Bupati Bandung), juga mendapat larangan pihak Jepang.⁶¹

Padahal ide untuk mengumpulkan zakat itu bertujuan untuk menghilangkan tekanan-tekanan yang disebabkan oleh dislokasi ekonomi yang sangat kejam di daerah Periang, dengan jalan diadakannya Baitul Maal itu diharapkan setidaknya jurang ketidak-adilan dalam bidang ekonomi bisa terhindarkan.⁶² Mengingat pada masa itu seluruh rakyat berada dalam posisi "ekonomi lemah", bahkan setiap orang yang mempunyai tanah pertanian, diharuskan oleh penjajah Jepang untuk bagi hasil, dalam artian harus menyetorkan hasil pertaniannya itu sebanyak separo dari penghasilannya itu demi membantu perang.⁶³

Melihat fenomena demikian, wajarlah bila masyarakat Indonesia setiap harinya makan pohon pisang, tikus, dan berpakaian karung atau goni, penyakit merajalela di mana-mana, kemiskinan, ketakutan, keterjepitan, ketidakpuasan muncul di mana-mana.⁶⁴

⁶¹Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah (Jakarta : LP3ES, 1986), hal. 156; Harry J.Benda, op.cit., hal.183.

⁶²Harry J. Benda, op. cit., hal. 179.

⁶³Baddruddin, Aktifis Heiho di Ngawi, Wawancara di Desa Pehnongko, Paron, Ngawi, 27 Januari 1989.

⁶⁴M.Misron, Aktifis Heiho, pada tahun 1926 di Penjara oleh Belanda bersama-sama Soekarno, Hatta Kasman Singodimejo dll., di Digul Irian setelah 2 tahun di penjara dia ikut lari bersama-sama Soekarno, Hatta dan lain lain pada tahun 1941, bersama-sama tentara Jepang menyerang Perharbaur, th 1942 berada di Taiwan, Korea, 1943 membantu tentara jepang di Sidney Australia, th 1944-1946 berada di Malaysia, Singapura dan daerah pendudukan Jepang lainnya. Th 1947 kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Hizbullah, Wawancara di rumahnya (Ngawi) tanggal 28 Januari 1989.

Jangankan bayangan Ibadah Haji, merawat dirinya sendiri sudah terlalu sulit,⁶⁵ lebih-lebih politik Jepang dalam masalah Haji masih memberlakukan semua UU dan peraturan-peraturan Pemerintah Hindia Belanda, di antaranya:

Pada tahun 1825 : Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonansi yang antara lain menetapkan, Melarang penduduk Pribumi naik Haji jika tidak memiliki pas jalan. Pas jalan hanya bisa diperoleh dengan membayar sejumlah F. 110,- th 1831: keluar Indische Staasblad No.24, yang isinya mengatur : pas jalan yang diperlukan untuk naik haji harus mendapat izin dulu dari Bupati setempat, pas jalan dikontrol oleh perwakilan Belanda di rute perjalanan yang dilewati. Jamaah yang kembali tanah suci harus menempuh ujian lebih dulu; bilamana lulus baru boleh menggunakan pakaian Haji.

Pada tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda dengan latar belakang Politik Etis, mengeluarkan Indische Statsblad No:397, menyebutkan bahwa Konsul Belanda selalu mengawasi Jamaah Haji.⁶⁶

Namun di samping peraturan yang dipakai Jepang yang eksistensinya mengambil UU-nya Belanda itu memang benar dijalankan oleh Jepang. Juga umat Islam sendiri sangat minim, dalam artian yang melaksanakan Ibadah Haji pada masa Jepang itu kalau bisa penulis sebutkan bisa dihitung dengan jari,⁶⁷ karena di samping keadaan perang yang masih berkobar juga adanya umat Islam yang lemah dalam bidang ekonomi.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Kiblat, "Fakta dan Dokumentasi Ibadah Haji Indonesia," (Jakarta : 20 Agustus-5 September, 1987), hal. 26-27.

⁶⁷ M. Misron, loc. cit.